

DETERMINAN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA SKPD KABUPATEN KULON PROGO**Ratna Purnama Sari¹, Suryanti²****Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta Email: ratnaps@upy.ac.id¹****Email: ratnaps@upy.ac.id¹****ABSTRACT**

The aim of this research is to know determinants of reliability of governmental financial reporting such as human resources quality, information technology utilization and internal control system. This research was done in Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kulon Progo. The data obtained by questionnaires distributed to 123 respondents consisting of the head and staff of the finance / Accounting department. The data analysis method was multiple linear regression. The result shows that the human resource quality is significantly affected to the reliability of Government Financial Reporting, while information technology utilization and internal control system are not affected.

Keywords: human resources quality, information technology utilization, internal control system, reliability of Government Financial Reporting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan keandalan pelaporan keuangan pemerintah seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Penelitian dilakukan di SKPD Kabupaten Kulon Progo dengan informasi pokok yang didapat melalui penyebaran angket ke sebanyak 123 responden yang terdiri atas kepala dan staf bagian keuangan/Akuntansi. Metode regresi linear berganda digunakan dalam analisis data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, keandalan pelaporan keuangan pemerintah

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik yang ada saat ini ditandai dengan bertambah kuatnya desakan masyarakat kepada pemerintah pusat juga daerah mengenai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas hasil kerja pemerintah. Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban pertanggungjawaban mengenai berhasil atau tidaknya atas misi organisasi yang sudah dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo 2009).

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk keterbukaan sebagai syarat pendukung adanya akuntabilitas publik. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus bermanfaat, karena banyak pihak mengandalkan untuk proses menentukan sebuah keputusan (Andriani 2010). Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan kredibel, apabila mempunyai sifat berguna secara langsung, dapat dipercaya, dapat dikomparasi, dan mampu untuk dimengerti (Ariesta 2013). Laporan keuangan dikatakan andal apabila laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dan terhindar dari kesalahan material, disajikan apa adanya, serta dapat dibuktikan kebenarannya (Sari dan Witono 2014).

Ringkasan Hasil eksaminasi Semester I (IHPS I) Tahun 2018 yang dihasilkan oleh BPK berisi 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari 700 LHP terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 38 LHP BUMN dan badan lainnya, serta 542 LHP pemerintah daerah. Dari total LHP itu menghasilkan 9.808 temuan yang berujung pada 26.871 rekomendasi dan 15.773 permasalahan. Permasalahan yang ditemukan berasal dari temuan 7.539 kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), 8.030 karena ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan 204 temuan karena ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan (Sugianto 2018).

Laporan keuangan pemerintah masih belum memenuhi kriteria andal, berdasarkan fenomena tersebut. Dua elemen pokok untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai (andal) yaitu informasi yang diperoleh dan faktor produksi penghasil informasi tersebut. Kemampuan insan sebagai pemakai informasi laporan keuangan diwajibkan agar mempunyai taraf kemahiran akuntansi yang mencukupi atau minimal mempunyai keinginan untuk maju dan berkembang dengan terus berusaha menambah wawasan dan mempertajam kemampuan di bidang akuntansi. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia mempunyai peran besar dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal) (Wahyono 2004, Ariesta 2013).

Pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kapabilitas pengelolaan finansial daerah serta penyaluran informasi finansial daerah terhadap pelayanan masyarakat umum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Indriasari dan Nahartyo 2008). Pemanfaatan teknologi informasi juga mampu meminimalisir kekeliruan didalam pengolahan informasi, agar laporan keuangan menjadi andal (Wardani dan Andriyani 2017).

Kelemahan SPI menjadi salah satu temuan BPK pada saat pemeriksaan laporan finansial pemerintah, padahal sistem pengendalian intern pemerintah memiliki kapasitas berharga. Pengoptimalan sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk memastikan pemangku kebijakan maupun masyarakat umum mengenai ketepatan dan keandalan laporan keuangan pemerintah (Roshanti, Edy Sujana dkk. 2014).

Penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Darwanis dan Mahyani (2009), Andriani (2010), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Wardani dan Andriyani (2017), dan Sukaesih (2017) menunjukkan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang memiliki pengaruh atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sementara itu, hasil riset Karmila, Tanjung dkk. (2014), Komarasari (2017) dan Susanti (2017) menunjukkan kualitas sumber daya manusia bukan faktor yang memiliki pengaruh atas keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil riset Andriani (2010), Darwanis dan Mahyani (2009), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Karmila, Tanjung dkk. (2014), Wardani dan Andriyani (2017), Komarasari (2017), dan Susanti (2017) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sementara, hasil riset Sukaesih (2017) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil riset Ariesta (2013), Darwanis dan Mahyani (2009), Sembiring (2013), Wardani dan Andriyani (2017), Komarasari (2017) dan Sukaesih (2017) menyatakan Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan hasil riset Karmila, Tanjung dkk. (2014) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak memengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan paparan diatas maka riset ini dilakukan dengan mengambil sampel SKPD di Kabupaten Kulonprogo.

LANDASAN TEORI

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan tatanan maupun rangkaian tindakan akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan informasi keuangan disiapkan untuk kemudian diinformasikan guna menuju arah keuangan dan sosial yang telah ditetapkan negara.

Proses akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah proses kerja dan interaksi antara pihak-pihak dan sarana-sarana pelaporan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan (Suwardjono 2014). Proses untuk mencapai tujuan dari sebuah program dan kegiatan, proses perwujudan target pendapatan, proses perwujudan alur keuangan belanja, serta proses perwujudan pembiayaan terdapat dalam laporan keuangan (Bastian 2010).

Penyusunan laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang berkaitan tentang keadaan keuangan dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit pemerintahan dalam satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Beberapa pihak yang berkepentingan akan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu hal yang fundamental didalam pengambilan keputusan. Sehingga, informasi yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah harus berguna (Kiranayanti dan Erawati 2016).

Kebermanfaatan merupakan suatu sifat yang harus ditentukan berdasarkan mutu dalam kaitannya dengan ketetapan pengguna terhadap informasi (Ariesta 2013). Keterkaitan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami adalah empat sifat kualitatif sebagai syarat yang harus ada sesuai dengan norma yang berlaku yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat mencapai taraf dari target yang ingin dicapai, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 71 Th 2010 tentang SAP, andal adalah sifat kualitatif laporan keuangan. Andal menjadi salah satu karakteristik pengukur kualitas laporan keuangan. Kualitas keuangan dapat diukur berdasarkan sifat diantaranya: (1) dapat dipahami,

(2) keterkaitan, (3) materialitas, (4) keandalan/reliabilitas, (5) penyajian jujur, (6) substansi mengungguli bentuk, (7) tidak terikat, (8) pertimbangan sehat, (9) kelengkapan, dan (10) bisa dibandingkan (Bastian 2010). Keandalan berarti bahwa informasi yang diberikan dari laporan keuangan terhindar dari pemahaman yang menyesatkan dan kekeliruan yang mendasar dalam menyajikan fakta dengan jelas, serta mampu dibuktikan kebenarannya. Penggunaan informasi keuangan pemerintah dapat menyesatkan, apabila penyajiannya tidak dapat diandalkan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Dua elemen utama untuk memperoleh suatu informasi yang andal atau bernilai adalah sumber daya yang menghasilkan informasi dan informasi yang dihasilkannya (Wahyono (2004) dalam Ariesta (2013)). Setiap organisasi pasti mempunyai sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang membuat visi dan inovasi organisasi, serta sumber daya manusia juga yang mencapainya. Hanya manusia sebagai elemen yang bisa mengakibatkan elemen organisasi lainya bekerja dan berpengaruh langsung atas keberlangsungan dan kemajuan organisasi (Darwanis dan Mahyani 2009).

Manajemen sumber daya manusia pada sebuah organisasi merupakan satu hal yang sangat fundamental, karena sumber daya manusia adalah bagian utama sebuah organisasi (Hariandja 2002). Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dipaksa agar lebih kompeten di bidang akuntansi atau setidaknya mempunyai rasa ingin tahu yang lebih dan mempertajam keahliannya dalam bidang akuntansi. Keahlian sumber daya manusia itulah yang memiliki pengaruh besar dalam menciptakan informasi yang mempunyai nilai (andal) (Ariesta 2013).

Kualitas sumber daya manusia merupakan kecakapan sumber daya manusia guna menjalankan tugas serta kewajibannya, berbekal pendidikan formal maupun informal, dan pengalaman yang memadai (Tjiptoherijanto (2001) dalam Sembiring (2013)). Mengukur kapabilitas sumber daya manusia dalam suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat diukur dari tingkat tanggung jawab dan kemampuan sumber daya yang bersangkutan (Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008)). Kemampuan sumber daya manusia tercermin berdasarkan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, serta berdasarkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.

Ariesta (2013), Sembiring (2013) dan Wardani & Andriyani (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah

H₁ : Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalanpelaporan keuangan pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi penunjang yang tersusun secara teratur dalam memberikan informasi, yaitu sistem berdasar (TI) yang mengolah komponen-komponen yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk mengubah data menjadi informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa komponen yang saling berkaitan dalam pemrosesan informasi untuk menunjang sistem informasi (Marakas dan O'Brien 2017). Disamping sebagai teknologi komputer guna mengolah serta menyimpan data informasi, teknologi informasi juga mampu digunakan untuk sarana komunikasi dalam penyaluran informasi.

Komputer merupakan komponen dalam teknologi informasi. Komputer merupakan gawai yang dapat menggandakan kapabilitas manusia dan melakukan pekerjaan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia. Selain organisasi bisnis, organisasi sektor publik termasuk pemerintah juga memanfaatkan perkembangan TI. Pemanfaatan teknologi informasi (komputer serta jaringan) dalam pengolahan data mempunyai banyak kelebihan dari sisi ketelitian dan ketepatan dalam pemrosesan maupun sebutannya sebagai gawai multifungsi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan (Indriasari dan Nahartyo 2008).

Dalam rangka terealisasinya proses pembangunan yang searah dengan pedoman tata pemerintahan yang baik, Pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban melakukan pengembangan serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menambah keahlian dalam pengelolaan finansial daerah, dan menyampaikan informasi finansial daerah pada pelayanan masyarakat umum (PP No. 56 Tahun 2005). Dalam rangka membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja secara terpadu, pemerintah juga perlu memaksimalkan penggunaan kemajuan teknologi informasi.

Sembiring (2013), Karmila, Tanjung dkk. (2014) dan Susanti (2017) menyatakan bahwa pemanfaatn teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalanpelaporan keuangan pemerintah

Sistem Pengendalian Intern

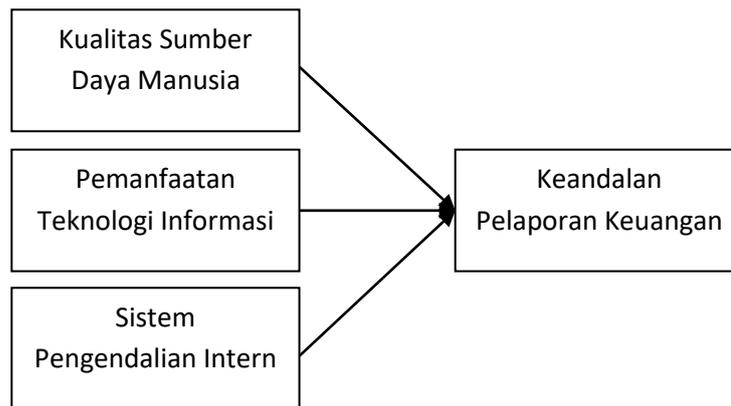
Sistem Pengendalian Intern merupakan rangkaian prosedur yang tidak terpisahkan dengan tindakan serta kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemangku kebijakan dan semua pegawai guna memberikan keyakinan atas tercapainya visi melalui kegiatan efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan undang-undang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah (PP No 60 Tahun 2008). Komponen SPIP terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Pengendalian intern digunakan untuk menekan risiko terjadinya kesalahan dan kecurangan sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi. Pengendalian yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam instansi dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Purwono (2004) dalam Komarasari (2017)).

Sembiring (2013), Wardani & Andriyani (2017) serta Komarsari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah

H₃ :Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalanpelaporan keuangan pemerintah

Model penelitian yang diajukan dalam riset ini tergambar pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian dan Sampel

Populasi penelitian adalah SKPD Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 41 SKPD. Sampel yang digunakan ialah pegawai bagian keuangan/bagian akuntansi SKPD Kabupaten Kulon Progo khususnya kepala atau staf sub-bagian keuangan/Akuntansi. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 123 kuesioner.

Variabel Penelitian

Keandalan (Y)

Keandalan merupakan kriteria laporan keuangan yang berkualitas. Indikator keandalan berdasarkan penyajian jujur, kenyataan, penyelesaian perbedaan, informasi yang kredibel, tidak terikat, dan pengarah informasi dengan 7 pernyataan dalam kuesioner (Wardani dan Andriyani 2017).

Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)

Kualitas SDM merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Tjiptoherijanto (2001) dalam Sembiring (2013)). Indikator variabel ini yaitu kemampuan setiap individu, peran dan fungsi dalam pencapaian

visi, pemahaman metode serta langkah akuntansi, dan pelatihan rutin, dan diuji dengan menggunakan 9 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani dan Andriyani 2017).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Teknologi informasi meruakan sistem berbasis IT yang mengelola komponen-komponennya untuk mentransformasi data menjadi informasi (Marakas dan O'Brien, 2017). Indikator pemanfaatan teknologi informasi yaitu rangkaian tindakan melalui elektronik, pengelolaan dan dokumentasi data keuangan, pemrosesan informasi menggunakan jaringan internet, sistem manajemen, dan perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, diuji menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani dan Andriyani 2017).

Sistem Pengendalian Intern (X3)

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP RI No. 60 Tahun 2008). Indikator variabel ini diambil dari penelitian yaitu perancangan yang sesuai, pembagian wewenang, dan penindakan kedisiplinan, pengujian menggunakan 4 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani dan Andriyani 2017).

Pengukuran variabel penelitian dilakukan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1 ekuivalen sangat tidak setuju, 2 ekuivalen tidak setuju, 3 ekuivalen netral, 4 ekuivalen setuju, dan 5 ekuivalen sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian ini berguna untuk mengukur seberapa cermat atau sesuai suatu pernyataan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur data penelitian dari para

responden. Uji validitas ini menggunakan metode korelasi Pearson. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikansi < 0.05 (Ghozali 2018).

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini berguna untuk melihat konsistensi yang dimiliki kuesioner apabila pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang (Ghozali 2018). Menurut Sujarweni (2014) kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha lebih dari 0,6.

Uji Hipotesis

1. Analisis Linear Berganda

Bertujuan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Persamaan regresi yang digunakan adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Keandalan pelaporan keuangan

α = Konstanta

ε = Standar error

2. Uji koefisien determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan mengetahui besarnya persentase pengaruh variabel X secara serentak terhadap variabel Y (Ghozali, 2018).

3. Uji F

Pengujian ini bermaksud untuk mengecek pengaruh variabel X secara serentak dilakukan terhadap variabel Y. Apabila nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X secara serentak terhadap variabel Y (Ghozali, 2018).

4. Uji t

Pengujian t digunakan untuk mengecek adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara sendiri-sendiri. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Sugiyono, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Data**

Statistik dari kuesioner terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Statistika Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Beredar	123	100%
Tidak kembali	41	33%
Bisa diolah	79	64%

Sumber : Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, angka prosentase kuesioner yang dapat diolah sebesar 64%. Hal tersebut terjadi karena dari sebanyak total 123 kuesioner yang disebar, terdapat sekitar 33% atau sebanyak 41 kuesioner yang tidak kembali. Sebanyak 82 kuesioner yang kembali terdapat 3 kuesioner yang tidak dapat diolah sehingga hanya 79 kuesioner yang dapat diolah. Karakteristik responden terlihat dalam tabel 2 berikut

Tabel 2

Karakteristik	Karakteristik Responden	
	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	38	48 %
- Perempuan	41	52 %
Tingkat Pendidikan		
- S2	11	14 %
- S1	36	46 %
- D3	8	10 %
- SMA	24	30 %

Jabatan		
- Kasubag		
Keuangan	28	35 %
- KASI	6	8 %
- Staf Keuangan	45	57 %

Masa Kerja		
- 1-5 tahun	9	11 %
- 6-10 tahun	11	14 %
- >10 tahun	59	75 %

Tabel 2 menunjukkan gambaran responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan dan lama bekerja. Terlihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan tingkat pendidikan terakhir di jenjang sarjana, berjabatan staf keuangan dan memiliki masa kerja diatas 10 tahun.

Hasil Penelitian

Sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda, maka perlu disampaikan hasil uji validitas dan reliabilitasnya.

Uji Validitas

Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel 3 berikut

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Buti Korel			Keterangan
	r	asi	Sig.	
Y1	0,679	0.000	Valid	
Y2	0,786	0.000	Valid	
Kendalan				
Pelaporan	Y3	0,811	0.000	Valid
Keuangan	Y4	0,759	0.000	Valid

Pemerintah	Y5	0,808	0.000	Valid
(Y)	Y6	0,549	0.000	Valid
	Y7	0,283	0.000	Valid
	X1.1	0,617	0.000	Valid
	X1.2	0,347	0.000	Valid
	X1.3	0,731	0.000	Valid
Kualitas	X1.4	0,717	0.000	Valid
SDM	X1.5	0,751	0.000	Valid
(X1)	X1.6	0,641	0.000	Valid
	X1.7	0,608	0.000	Valid
	X1.8	0,707	0.000	Valid
	X1.9	0,699	0.000	Valid
	X2.1	0,749	0.000	Valid
	X2.2	0,774	0.000	Valid
	X2.3	0,595	0.000	Valid
	X2.4	0,511	0.000	Valid
TI (X2)	X2.5	0,733	0.000	Valid
	X2.6	0,738	0.000	Valid
	X2.7	0,729	0.000	Valid
	X3.1	0,634	0.000	Valid
SPI (X3)	X3.2	0,662	0.000	Valid
	X3.3	0,399	0.000	Valid
	X3.4	0,667	0.000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji validitas, terlihat bahwa variabel Y memiliki 7 (tujuh) item pertanyaan yang valid, variabel X1 memiliki 9 (sembilan) item pertanyaan yang valid, variabel X2

KSDM	0.098	0.547	3.878	0.000
	0.381			
PTI	0.073	-0.191	-1.748	0.085
	-0.127			
SPI	0.170	0.239	0.104	0.479
R square				0.323
F hitung: 11.920				0.000

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

:

$$Y=15.089+0,381X_1-0.127X_2+0,170X_3+ \varepsilon$$

Persamaan regresi diatas berarti :

Nilai konstanta sebesar 15.089 dapat diartikan jika X_1 , X_2 , dan X_3 nilainya adalah 0, maka keandalan laporan keuangan pemerintah (Y) nilainya adalah 15.089. Koefisien regresi variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) sebesar 0.381 yang artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Kualitas SDM (X_1) naik 1%, maka Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah akan mengalami peningkatan 0.381. Koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) sebesar -0.127 dapat diartikan jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah akan mengalami penurunan -0.127. Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3) sebesar 0.170 yang artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) mengalami kenaikan 1%, maka Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah akan mengalami peningkatan 0.170.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5 dapat dilihat nilai signifikansi untuk pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 0.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara KSDM, PTI, dan SPI terhadap Keandalan Laporan Keuangan secara simultan.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian uji statistik t dilakukan untuk menentukan apakah variabel KSDM, PTI dan SPI berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan secara parsial. Variabel KSDM memiliki nilai t hitung 3.878 dengan signifikansi 0.000 (<0.050) yang berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah terdukung. Variabel PTI memiliki nilai t hitung sebesar -1.748 dengan nilai signifikansi sebesar 0.085 (>0.050) yang berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah tidak terdukung. Variabel SPI memiliki nilai t hitung sebesar 0.712 dengan nilai signifikansi sebesar 0.479 (>0.050) yang berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah tidak terdukung.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.323 menunjukkan bahwa keandalan pelaporan keuangan pemerintah SKPD di Kabupaten Kulonprogo dipengaruhi oleh variabel kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebesar 32,3%, dan sisanya 67,7% justru dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hipotesis pertama (H1) menyatakan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil uji t menyatakan hipotesis (H1) terdukung. Sehingga dapat memberi kesimpulan kualitas sumber daya manusia secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan finansial pemerintah. Kian bertambah baik kualitas sumber daya manusia disuatu organisasi, berbanding lurus dengan keandalan pelaporan keuangan organisasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ariesta (2013), Sembiring (2013), dan Wardani dan Andriyani (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hipotesis kedua (H2) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan finansial pemerintah. Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis (H2) tidak terdukung. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Sukaesih (2017) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh atas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi kemungkinan karena sumber daya manusia di pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Apabila dalam suatu organisasi dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi maka pelaporan keuangan akan lebih baik dan maksimal.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis (H3) tidak terdukung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Karmila, Tanjung dkk. (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian intern secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal ini kemungkinan terjadi karena SKPD Kabupaten Kulon

Progo tahun 2019 belum maksimal dalam menjalankan sistem pengendalian intern yang ada. Lemahnya penerapan sistem pengendalian intern juga bisa menjadi salah satu penyebabnya.

Simpulan

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Wawancara terhadap responden perlu dilakukan untuk memperkuat data penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2010). "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)." *Jurnal Akuntansi & Manajemen* 5(1): 69-80.
- Ariesta, F. (2013). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia." Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penegndalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta, Erlangga.
- Darwanis, D. and D. D. Mahyani (2009). "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 2(2): 133-151.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang, Undip.

- Hariandja, M. T. E. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indriasari, D. and E. Nahartyo (2008). Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:: Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, Universitas Gadjah Mada.
- Karmila, K., et al. (2014). "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)." *Sorot* 9(1): 25-42.
- Kiranayanti, I. A. E. and N. M. A. Erawati (2016). "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-jurnal Akuntansi*: 1290-1318.
- Komarasari, W. (2017). "Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)." *Prodi Akuntansi UPY*.
- Kosegeran, A. I., et al. (2016). "Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara." *ACCOUNTABILITY* 5(2): 178-190.
- Marakas, G. M. and J. A. O'Brien (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo (2009). "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan "Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah."
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purwono, E. (2004). *Aspek-Aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*. Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Roshanti, A., et al. (2014). "Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 2(1).
- Sari, S. P. and B. Witono (2014). "Keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi."
- Sembiring, F. L. (2013). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)." *Jurnal Akuntansi* 1(1).
- Sugianto, D. (2018). "BPK Catat 15.773 Masalah di Laporan Keuangan Pemerintah hingga BUMN." *detikFinance*, (Online), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>, diunduh 2 Oktober 2018.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Sukaesih, S. (2017). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan

- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)." Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Susanti, F. (2017). "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)." Prodi Akuntansi UPY.
- Suwardjono (2014). Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta, BPFY-YOGYAKARTA.
- Wahyono, T. (2004). Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain, dan Pemrograman Komputer. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Wardani, D. K. and I. Andriyani (2017). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten." Jurnal Akuntansi 5(2): 88-98.